

Analisis Motivasi dan Kinerja pada Penyederhanaan Birokrasi di Kantor Walikota Binjai

Vina Rahmanda, Muhammad Irwan Padli Nasution
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: vina12r@gmail.com, irwannst@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana motivasi penyederhanaan birokrasi yang di Kantor Walikota Binjai. Menggunakan teknik observasi dengan menggunakan kualitatif dengan bentuk deskriptif studi literature. Latar belakang dari penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya untuk memangkas jumlah pegawai sehingga membuat kinerja para karyawan apakah memberikan efek negative atau positif dari penerapan pemangkasan jabatan tersebut. Maka dari itu atasan harus memberikan motivasi kepada karyawan agar mereka tidak kehilangan semangat dan kinerjanya. Dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi pada karyawan sangat diperlukan untuk mempertahankan kinerja baik itu bentuk jabatan tertinggi maupun terendah. Dan bahwa dari yang saaya lihat ketika magang para pemangku jabatan di kantor walikota binjai sangat memperdulikan para karyawanya termasuk dalam kinerja mereka.

Kata kunci: analisis, karyawan, magang

PENDAHULUAN

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya untuk memangkas jumlah pegawai yaitu eselon yang tadinya 5 (lima) menjadi 2 (dua). Terkait dengan rencana tersebut, menurut Kepala Biro Humas Badan KepegawaianmNegara (BKN) Mohammad Ridwan hingga saat ini ada sekitar 430.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di level eselon III, IV dan V. Untuk jumlah eselon I di Indonesia ada 575 orang atau 0,12 persen, sedangkan eselon II ada 19.463 orang atau 4,23 persen, sehingga total eselon I dan II di Indonesia ada sekitar 20.000 atau 4,35 persen. Total jumlah eselon I sampai dengan V adalah 460.067 orang.2 Penghapusan ini salah satunya bertujuan untuk memindahkan orientasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penghapusan diharapkan mampu mengurangi biaya yang tidak diperlukan seperti untuk pemberian fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eselon III dan IV.

Sekalipun aturan tentang penyederhanaan birokrasi ini sudah dikeluarkan, namun pemerintah sampai saat ini masih berproses dalam menentukan strategi implementasi kebijakan yang tepat agar tidak sampai terjadi gejolak atau retensi dari para Abdi Negara atau PNS. Dampak negatif yang perlu diantisipasi dari kebijakan ini adalah dampak psikologis pejabat eselon III, IV, dan V yang akan kehilangan jabatan. Hal lain lagi yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan instansi pemerintah dalam menghadapi perubahan organisasi yang terjadi karena penyederhanaan birokrasi ini. Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana motivasi dan kinerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah pusat dan daerah setelah diimplementasikannya kebijakan peralihan dan pemngkasan jabatan tersebut. Harapannya hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan bagaimana strategi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi ini yang lebih tepat dan kondusif sehingga tidak berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja pemerintahan.

Dalam meningkatkan kinerja pegawai tersebut, sangat dibutuhkan motivasi pegawai yang tinggi. Motivasi memberikan alasan seseorang untuk bekerja secara baik sesuai dengan prosedur, standar

dan target yang telah ditetapkan. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk bekerja, misalnya adalah gaji yang besar, pimpinan yang mengayomi, fasilitas kerja memadai, lingkungan kerja yang nyaman serta rekan kerja yang menyenangkan dan lain-lain. Seperti diketahui dalam jurnal yang telah diteliti oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang menyatakan bahwa motivasi sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis bertujuan ingin memberitahukan motivasi kinerja karyawan yang terjadi pada pegawai setelah penerapan dari penyederhanaan birokrasi serta efektivitas dan efisiensi kinerja para karyawan pada Pemerintah Kota. Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Binjai.

I. LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia birokrasi diartikan kantor dan istilah birokrasi mempunyai beberapa arti : (1) Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat; (2) Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri; (3) Cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut aturan, kebiasaan, dan banyak liku-likunya.¹

Menurut MenParb, Penyederhanaan Birokrasi adalah Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.²

Menurut Moehariono (2012, hal. 95) "Kinerja atau Performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi". Dari definisi diatas Kinerja adalah hasil kerja yang kita lakukan dengan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.³

Menurut Samsudin (2010, hal. 281) mengemukakan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan⁴.

Model birokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang, utamanya terbentuk dan dipraktikkan pada beberapa Negara sejak terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad pertengahan. Pada era tersebut badan-badan birokrasi pemerintah dan profesi birokrasi tumbuh berkembang seiring dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan industri dan profesi pekerjaan yang ada pada institusi (perusahaan) swasta. Sejak revolusi industri, unit institusi pemerintah berkembang semakin kompleks dan variatif, dengan pola/sistem rekrutmen, pendidikan, pekerjaan, dan pengajian. Berkembangnya kompleksitas instansi birokrasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan swasta dan masyarakat Terhadap pelayanan dan perlindungan pemerintah.

Dalam perubahannya penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Untuk mewujudkannya ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Metodologi Penelitian

¹ Maria Susiawati, 'PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH WONOSOBO', 1.2 (2021), 1–10.

² Humas Menparb, 'Penyesuaian Sistem Kerja Pemerintah , Buah Penyederhanaan Birokrasi', 2022, pp. 20–22.

³ Pamed Abdul Sadat, Susi Handayani, and M. Kurniawan, 'Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan', *Inovator*, 9.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.32832/inovator.v9i1.3014>>.

⁴ Sadat, Handayani, and Kurniawan.

Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian Kualitatif dengan deskriptif dengan metode literature. Menurut Creswell, John. W. (2014; 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan.

Teknik data yang saya gunakan yaitu observasi, dengan mencari bahan di sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan bahan magang yang saya dapatkan di kantor walikota Binjai

II. HASIL PEMBAHASAN

Penjelasan Singkat tentang Kota Binjai

Kota Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah Barat ibu kota provinsi Sumatra Utara, Kota Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Jumlah penduduk kota Binjai sebanyak 279.302 jiwa (2021), dengan kepadatan 3.095 jiwa/km².

Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh Jalan Raya Lintas Sumatra yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh.

Pada tahun 1945, (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu. Pada 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bonger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada tahun 1948 -1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah OK Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama SS Parumahan

Dalam perkembangannya Binjai di pegang oleh Bapak Amir Hamzah sebagai Walikota Binjai Periode 18 (2020). Kota Binjai terdiri dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 59,19 km² dan jumlah penduduk sekitar 274.697 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 89 jiwa/km². Yang terdiri dari 5 kecamatan :

1. Binjai Barat
2. Binjai Utara
3. Binjai Selatan
4. Binjai Timur
5. Binjai Kota

Adapun Visi dan Misi Pemko Binjai sekarang ini (Periode 2020 – 2024) yang dipimpin oleh H. Junaidi, S.Pd,MM dengan wakilnya Drs. H. Amir Hamzah, M.Ap yaitu :

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius

MISI :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional,
2. Meningkatkan Infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan,
3. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Pembahasan

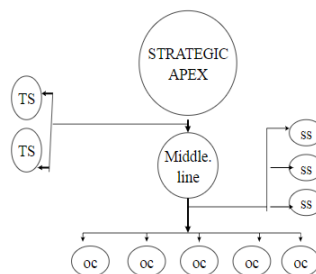
Arahan Presiden Joko Widodo mengenai penyederhanaan birokrasi dengan membentuk struktur organisasi dua layers yang kemudian dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sejalan dengan cita-cita mewujudkan birokrasi kelas dunia. Dalam pidato politik pada 14 Juli

2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangan perlunya reformasi struktural untuk mewujudkan lembaga yang semakin sederhana, semakin simpel, lincah, yang menjamin kecepatan melayani, kecepatan dalam pemberian perizinan, efisien, dengan didukung mindset aparatur yang berubah. Arahan tersebut dipertegas dalam pidato pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019 yaitu harapan dan arahan presiden mengenai reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan cepat dalam pelayanan publik, dan secara spesifik presiden melemparkan gagasan struktur organisasi dua layers sebagai struktur organisasi pemerintah yang ideal untuk mewujudkan hal tersebut.⁵

Struktur Organisasi Dua Layers dan Birokrasi Profesional Badan Kepegawaian Nasional (2010), mengelaborasi beberapa definisi organisasi dan menyimpulkan bahwa “organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama”, atau “organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih lanjut diuraikan bahwa ciri-ciri organisasi adalah (a) Adanya komponen atasan dan bawahan; (b.) Adanya kerjasama yang berstruktur dari sekelompok orang; (c) Adanya tujuan; (d) Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati; (e) Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.⁶

Henry Mintzberg (1993) mengelompokkan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam organisasi ke dalam 5 (lima) unsur yang pada umumnya ada pada struktur organisasi publik, yaitu : (a) The Strategic Apex, fungsi ini menjadi tanggungjawab pimpinan organisasi dalam rangka menjamin tercapainya keseluruhan kegiatan organisasi sesuai dengan visi misi organisasi. (b) The Middle Line, berfungsi menjembatani antara the strategic apex dengan operating core yang diisi oleh seperangkat pejabat struktural menengah (dari pejabat struktural senior hingga pejabat struktural paling rendah). (c) Operating Core merupakan fungsi pelaksanaan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan masyarakat. Dalam struktur pemerintah daerah, fungsi ini dilaksanakan oleh dinas. (d) The Technostructure, berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengkaji dan menyarankan berbagai pedoman-pedoman atau standarisasi-standarisasi tertentu. (e) The Support Staf, berfungsi mendukung tugas-tugas organisasi yang berada di luar pelaksanaan aliran kerja organisasi. Pengelompokkan fungsi tersebut digambarkan dalam susunan/bagan organisasi sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI



Sumber: Mintzberg. 1993

Dalam Pasal 4 ayat (1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. Penyetaraan Jabatan; dan

⁵ Susiawati.

⁶ Susiawati.

3. Penyesuaian Sistem Kerja.

Maksud dan tujuan dari penyesuaian Sistem Kerja sesuai dengan Pasal 6, yaitu:

1. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
2. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
3. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
4. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁷

Motivasi Kerja

Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh Soleh Purnomo (2004:36) menyatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Pada kantor walikota kinerja para karyawan yang saya lihat ketika magang dan observasi karyawan memiliki kinerja yang bagus. Untuk pendapatan mereka yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan posisi yang ditempati. Untuk atasan mereka cukup memberikan motivasi kepada para karyawan dan yang saya lihat mereka sangat ramah. Hal tersebut berdampak positif pada kinerja karyawan

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari observasi bahwa penyederhanaan birokrasi ini tidak mempengaruhi efektivitas kinerja dan serta para atasan pegawai sangat mendukung dan ramah terhadap bawahan. Dan tujuan adanya penyederhanaan birokrasi ini yaitu sesuai pasal 6 :

1. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
2. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
3. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
4. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

IV. REFERENSI

- Ald Humas Menpab, 'Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi', 17 February, 2022, pp. 4–8
- Menparb, Humas, 'Penyesuaian Sistem Kerja Pemerintah , Buah Penyederhanaan Birokrasi', 2022, pp. 20–22
- Sadat, Pamed Abdul, Susi Handayani, and M. Kurniawan, 'Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan', *Inovator*, 9.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.32832/inovator.v9i1.3014>>
- Susiawati, Maria, 'PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH WONOSOBO', 1.2 (2021), 1–10
- Yoesana, Umy, 'Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara', *EJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1.1 (2013), 13–27

⁷ Ald Humas Menpab, 'Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi', 17 February, 2022, pp. 4–8.

⁸ Umy Yoesana, 'Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara', *EJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1.1 (2013), 13–27.